



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR 188.4/ 7 /DPRD/2025

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 188.4/21/DPRD/2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 180/151/HUK/XI/2024 tanggal 6 November 2024 perihal Program Pembentukan Perda (Promperda) Kab. Barito Timur Tahun 2025;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 180/158/HUK/XI/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Penambahan Program Pembentukan Perda (Promperda) Kab. Barito Timur Tahun 2025;
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 180/5/HUK/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 perihal Penambahan Program Pembentukan Perda (Promperda) Kab. Barito Timur Tahun 2025;
 4. Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Barito Timur dengan agenda Persiapan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025, tanggal 7 November 2024.
 5. Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Barito Timur dengan agenda Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025, tanggal 4 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan DPRD ini;

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 188.4/21/DPRD/2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025, dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Bupati Barito Timur sebagai Dokumen Penyusunan dan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan DPRD ini disampaikan pada Rapat Paripurna I Masa Sidang III Tahun Sidang 2025;
- KEENAM : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal Juni 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA,**

NURSULISTNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/ /DPRD/2025
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		UNIT/ INSTANSI TERKAIT
				BARU	UBAH	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Raperda	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	×		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Raperda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	×		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.	Raperda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	×		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.	Raperda	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 27 Tahun 2005 tentang Ikatan Dinas, Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Beasiswa di Kabupaten Barito Timur	Pedoman Ikatan Dinas, Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Beasiswa di Kabupaten Barito Timur		×	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia

1	2	3	4	5	6	7
5.	Raperda	Peredaran dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Barito Timur	1. Golongan Minuman Beralkohol, Penjualan dan Tempat Mengonsumsi; 2. Ijin dan pemasangan label; 3. Pengangkutan, Peredaran dan Pengawasan; 4. Keperluan Adat; 5. Peran Serta Masyarakat; 6. Ketentuan Penyidikan; 7. Ketentuan Pidana.	x		Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
6.	Raperda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Dokumen RPJMD	x		Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
7.	Raperda	Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Melindungi Hak-hak anak, Mencegah Praktik Perkawinan Usia Anak, Menjamin Tumbuh Kembang Anak secara Optimal, serta meningkatkan Kualitas Hidup Anak dan Keluarga	x		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7
8.	Raperda	Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Barito Timur	Pengelolaan Air Limbah Domestik yang lengkap, efisien, efektif dan berwawasan lingkungan	x		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
9.	Raperda	Perusahaan Umum Daerah Nansarunai	Pelayanan Kemanfaatan Umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hidup masyarakat sesuai dengan Tata kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang dilaksanakan berdasarkan Tata Kelola perusahaan yang baik dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan perkembangan perekonomian di daerah.	x		Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5	6	7
10.	Raperda	Pengarusutamaan Gender (PUG)	Guna memberikan Arah, Landasan dan Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berperspektif Gender	x		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
11.	Raperda	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	Untuk mewujudkan Kesenjangan dan Nondiskriminasi bagi Penyandang Disabilitas	x		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial
12.	Raperda	Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 - 2045	Untuk mengintegrasikan Aspek Kependudukan dalam seluruh Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan, berkelanjutan, dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat	x		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7
13.	Raperda	Masyarakat Hukum Adat	Bertujuan untuk mengakui, melindungi, dan menghormati hak-hak tradisional serta keberadaan MHA di wilayah hukum Kabupaten Barito Timur, serta menjadi landasan untuk memastikan MHA dapat terus hidup dan berkembang sesuai dengan adat dan budayanya, sekaligus berkontribusi pada pembangunan daerah	×		Dinas Lingkungan Hidup
14.	Raperda	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur	Guna mengatur struktur organisasi dan mekanisme kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan	×		Sekretariat Daerah
15.	Raperda	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Barito Timur	Untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh Masyarakat di Kabupaten Barito Timur	×		Satuan Polisi Pamong Praja

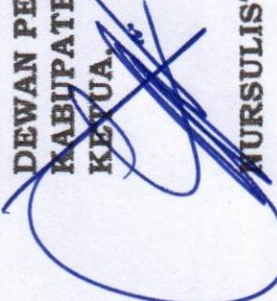
1	2	3	4	5	6	7
16.	Raperda	Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Pskotropika dan Zat adiktif lainnya	Agar tercipta lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Pskotropika dan Zat adiktif lainnya serta untuk bersinergi dalam upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan penanggulangan dampak negatif dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Pskotropika dan Zat adiktif lainnya	×		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17.	Raperda	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah RPJM-nya Lingkungan sebagai instrument lingkungan hidup yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu	×		Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7
18.	Raperda Inisiatif	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Guna menjamin Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Timur dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha	x		Sekretariat DPRD
19.	Raperda Inisiatif	Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Barito Timur	Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan guna menjamin persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga	x		Sekretariat DPRD
20.	Raperda Inisiatif	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Barito Timur	Tata Cara Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi	x		Sekretariat DPRD

1	2	3	4	5	6	7
21.	Raperda Inisiatif	Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Barito Timur	Tata Kelola Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan Masyarakat	×		Sekretariat DPRD
22.	Raperda Inisiatif	Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah Dunia Usaha dan Masyarakat secara Sinergis dalam bentuk Penumbuhan Iklim dan Pengembangan Usaha terhadap UMKM sehingga tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang Tangguh dan Mandiri	×		Sekretariat DPRD

1	2	3	4	5	6	7
23.	Raperda Inisiatif	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Barito Timur	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dalam rangka memajukan Kesejahteraan Umum	x		Sekretariat DPRD
24.	Raperda Inisiatif	Pemerintah Desa dan Kelengkapannya	Merupakan Instrumen Hukum yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mulai dari Struktur Kelembagaan, Tugas dan fungsi, hingga Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	x		Sekretariat DPRD
25.	Raperda Inisiatif	Pengelolaan Keuangan Daerah	Guna mengatur seluruh siklus keuangan di tingkat daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran publik	x		Sekretariat DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA


MURSULISTIO